

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugas dengan baik atau tidak (Suprpto, 2006).

Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik yang harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Kepala Daerah berusaha melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD beserta Entitas SKPD tersebut, agar laporan keuangan yang dihasilkan SKPD tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK. Pemeriksaan Keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian informasi keuangan. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK RI tentang kewajaran penyajian

informasi keuangan. Pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada pertimbangan atas:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Efektivitas Pengendalian Intern;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan; dan
- d. Pengungkapan yang Lengkap (*Full Disclosure*).

Pada tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah baru tentang Standar Akuntansi Pemerintahan No. 24 tahun 2005. Sebagai pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Huang *et al.* (1999) dalam Xu *et al.* (2003) menyatakan bahwa informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai . Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

- a. Relevan
- b. Andal

Suatu informasi dikatakan andal apabila :

1. Dapat diuji kebenarannya (*verifiabel*)
 2. Netral
 3. Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*)
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Fenomena yang terjadi bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini *adverse* dan *disclaimer* karena penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang disyaratkan. Tapi apakah laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini WTP dan WDP memang telah mencerminkan laporan dengan pengungkapan yang benar-benar baik. Hal ini masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan. Apakah laporan keuangan yang di hasilkan oleh pemerintah telah mencerminkan pengungkapan laporan dengan tingkat pengungkapan yang baik.

Pada tahun anggaran 2007, pemerintah daerah harus wajib untuk membuat APBD sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006, begitu juga dalam penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di pemerintah daerah membuat laporan keuangan masing-masing SKPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Khusus dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah di samping memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan daerah, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan daerah

yang sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten LabuhanBatu dalam opininya pada tahun anggaran 2005 sampai dengan 2006 memberikan pendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Pada tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun 2008, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) dan pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan dalam opininya pada tahun anggaran 2009 sampai dengan 2011 memberikan pendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

<http://medan.bpk.go.id/?p=6220> di akses 21 maret 2013

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kepala daerah harus membuat sistem akuntansi pemerintahan daerah yang mengacu kepada peraturan daerah tentang pokok pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah harus juga menetapkan kebijakan akuntansi berdasarkan peraturan kepala daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rynandi (2008) bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang bisa mendorong terciptanya laporan barang yang berkualitas. Andriani (2010) yang mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan dari kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan laporan keuangan dan ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Mahardika

(2011) yang mengungkapkan adanya pengaruh positif dan signifikan faktor sumber daya manusia terhadap ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

Latar belakang pendidikan mempunyai peran yang sangat penting karena dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan dalam proporsi tertentu diharapkan dapat memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh suatu pekerjaan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau setidaknya memiliki pengalaman di bidang keuangan sangat dibutuhkan dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan. Masalah-masalah tersebut adalah belum dimilikinya atau kurangnya sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan akuntansi, belum ada kebijakan rekrutmen pegawai berlatar belakang akuntansi, dan adanya anggapan bahwa sumber daya manusia yang bukan berlatar belakang akuntansi mampu melaksanakan tugas dengan modal pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bimbingan (Nazier, 2009).

Dengan demikian, pemahaman, skill, dan kemampuan pegawai bisa mempengaruhi kualitas dari laporan yang akan mereka susun.

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 setiap pemerintah daerah diharuskan untuk melakukan pembenahan diri baik dalam sumber daya manusia (SDM) maupun dalam hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Indriasari dkk (2011) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan dan semakin kompleks. Pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan *output* lainnya lebih tepat waktu.

Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan Andriani (2010) juga menemukan bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan. Ini menunjukkan bahwa teknologi informasi akan meningkatkan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Peraturan, latar belakang pendidikan, pelatihan, komitmen, perangkat pendukung yang ada mendukung terhadap penciptaan kemampuan aparatur terkait dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kabupaten Labuhanbatu”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah faktor eksternal (EKS) mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus maka permasalahan dibatasi pada Analisis Faktor yang mempengaruhi Laporan keuangan kabupaten Labuhanbatu(Dinas Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu) .

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ada pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
2. Apakah ada pengaruh SPI terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

3. Apakah ada pengaruh faktor eksternal terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh Sumber Daya Manusia(SDM),Sistem Pengendalian Internal(SPI) dan Faktor Eksternal dalam kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam memperbaiki cara berfikir penulis dalam menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode ilmiah
2. Bagi Akademis, penelitian ini berguna untuk memluas wawasan serta sudut pandang mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesejahteraan sosial terhadap pembangunan manusia
3. Bagi peneliti lanjutan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut.